



**PERUBAHAN RENJA RENCANA
KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI
Jl.Rawa Tembaga . No .1 Telp. (021) 885 2144
BEKASI**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026 dapat kami susun. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Bekasi Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114198610 2001

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB PENDAHULUAN

I

1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	10
1.3	Maksud dan Tujuan	15
1.4	Sistematika Penulisan	16

BAB HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

II

2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	25
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat Daerah	30
2.4	Rewiew terhadap rancangan Awal RKPD	30
2.5	Penelahaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	33

BAB BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III

3.1	Telaah terhadap kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3	Program dan Kegiatan	38
		39

BAB

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V

PENUTUP

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

DAFTAR TABEL

Tabel II.I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tabel II.II.I	Evaluasi Capaian Kinerja
Tabel II.II.II	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel II.II.III	Realisasi Anggaran
Tabel II.III	Isu-isu strategis
Tabel II.IV	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel II.V	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Bekasi, serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kota Bekasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

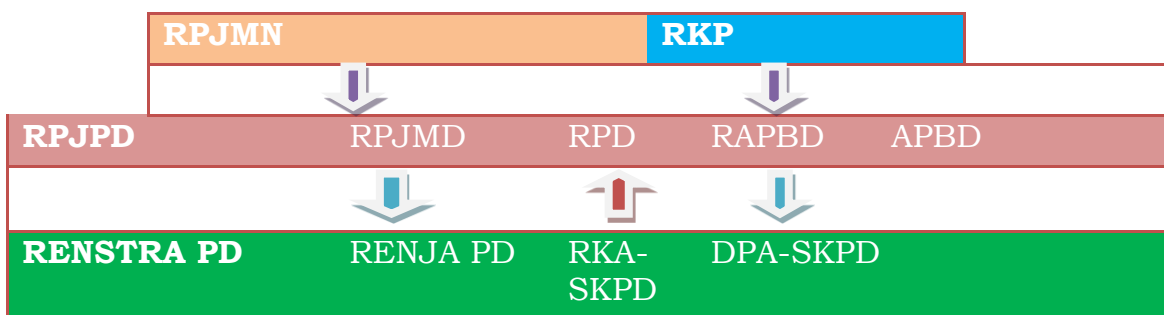
Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dengan Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Keterangan:

dipedomani dan/ataudiacu

dipedomani dan/ataudiacu

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan pada akhirnya Perubahan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (**RKA-SKPD**) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang terkait pemerintah daerah seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3458);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan Memberikan arah pembangunan ketenagakerjaan di tahun 2025 dan Menjadi acuan bagi penyusunan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota pada tahun 2026; dan Sebagai alat pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; dan 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB	II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
BAB	IV	PERUMAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI 4.1 Program dan Kegiatan
BAB	V	PENUTUP

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bidang Ketenagakerjaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun

Pelaksanaan evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. Factor kegagalan/keberhasilan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian
Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

Kode	Urusan Bidang/ Urusan Pemerintahan & Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome Kegiatan Ouput	Target Kinerja & Capaian Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan n-3 2023	Target Realisasi Program Kegiatan Tahun lalu n-2			Target Program & Kegiatan (Rencana PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2025	Realiasi Rencana PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi Persen		Realisasi capaian Program/Kegiat an s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
	5	6	7	8	9	10(5+7=9)	11	12	13(5=7=9)	14 (10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2.7.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	5,00 Laporan	5,00 Laporan	5,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212,00 Orang/bul an	1.260,00 Orang/Bulan	212,00 Orang/bula n	212,00 Orang/bul an	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	4,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD								
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2,00 Paket	0	2,00 Paket	2,00 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6,00 Orang	3,00 Orang	6,00 Orang	6,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	75,00 Orang	0	75,00 Orang	75,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,00 Paket	8,00 Paket	8,00 Paket	8,00 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00 Paket	6,00 Paket	6,00 Paket	6,00 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	6,00 Paket	6,00 Paket	6,00 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.2.06.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	0	1,00 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19,00 Unit	19,00 Unit	19,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13,00 Unit	13,00 Unit	13,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	6,00 Unit	6,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00 Unit	12,00 Unit	12,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	234,00 Unit	234,00 Unit	234,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	398,00 Orang	49 orang	398,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.03.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3,00 Perizinan	3,00 Perizinan	3,00 Perizinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	75,00 Perusahaan	75,00 Perusahaan	75,00 Perusahaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	70,00 Orang	70,00 Orang	70,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350,00 Orang	350,00 Orang	350,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2.04.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90,00 Orang	90,00 Orang	90,00 Orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan peker	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	108 yang di cegah	106 yang di cegah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
5.2.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1 perkara	1 perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	1 lembaga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5.000 orang	0	5.000 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2024 tidak tercapai dikarenakan ada kekosongan jabatan Kepala Bidang waktu penyedia terbatas dikarenakan sudah di triwulan IV. kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Prsentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.5 %	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3 %	0.3 %	0.5 %	0.8 %	0.8 %	10 %	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	67.8 %	50 %	50 %	55.7 %	60 %	67.8 %	54.22 %	60 %	67.8%	70 %	80 %	100 %	
4	Presentase Perusahaan yang menrapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB.LKS Bipartit Strutur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	26.6 %	25.4 %	25,76 %	26 %	26.7 %	26.6 %	25 %	25.6 %	26.5 %	50 %	60 %	100 %	
5	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dala dan luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja	4.380	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	30 %	20 %	80 %	90 %	100 %	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara umum Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja dengan target 100 % ,Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi , Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, Presentase Perusahaan yang menrapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB.LKS Bipartit Strutur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan dan Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dala dan luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (**output**) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja adalah

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Kebutuhan Industri akan tenaga kerja trampil
2. Tren Penurunan kelas menengah
3. Perluasan Daya serap Lapangan kerja

Perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun **kegagalan** yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih Kurangnya kompetensi pencari kerja
2. Kurangnya produktifitas tenaga kerja
3. Perluasan Daya Serapnya tenaga kerja dan Jumlah lowongan masih sedikit
4. Masih adanya sangketa pengusaha dan pekerja, walau dapat diselesaikan tingkat mediasi (Kurangnya SDM) Mediator

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yakni sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pencari kerja
- b. Melaksanakan Jobfair Tingkat Kota Bekasi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2024 dilaksanakan secara kuisioner berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya Pengangguran	Pencari kerja tidak mendapatkan informasi/pengetahuan dan pemahaman tentang lowongan kerja
		tingkat kemiskinan masih tinggi	Tingkat Pendidikan yang rendah
		Pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan belum memenuhi standar	Keahlian/Kompetensi yang rendah
2	Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja	Masih banyak perusahaan yang tidak mau mempekerjakan tenaga kerja difabel	Perusahaan masih kurang memperhatikan/kekhawatiran bahwa difabel tidak dapat bekerja secara optimal
3	Peluang kerja di luar negeri	Pekerja Migran Indonesia masih banyak yang ilegal	Kesadaran dan pengetahuan yang minim
4	Masih ada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yang Tidak Melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker	Masih banyaknya pengangguran	Banyaknya Perusahaan yang tutup

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi harus terus mendorong dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Bersama agar hubungan antara Perjanjian Kerja dan Perjanjian

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bersama agar hubungan antara Perusahaan dan Pekerjaanya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tingkat permasalahan antara Perusahaan dan pekerjaanya

A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi Kota Bekasi , maka tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang dan mengacu pada amanat RPJMD Kota Bekasi, maka visi pembangunan Kepala Daerah

”Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”

Dengan MISI Kepala Daerah Kota Bekasi

1. Meningkatkan Jangkauan mutu pelayanan publik perkotaan yang memuaskan dengan di dukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan ualitas hidup manusia dan lingkungan hidup perkotaan, baik jasmani maupun Rohani,yang semangkin kondusif dan berkelanjutan .
3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan perkembangan ruang -ruang inovasi dan kreativitas produktivitas dalam maffaatkan kmajuan tehnologi informasi dan komonikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha Pembangunan dan dunia usaha uang berkeadilan rayat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan pengetuatan manajemen pemerintahan Kota yanggmendorog kota Bekasi sebagai Kota bertaraf Internasioanl yang keren;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif sebagai Penyangga Ibu Kota Jakarta , banyak terdapat pengusaha baik formal karena banyak lahan-lahan buat usaha kecil. dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak dan masih tingginya angka pengangguran.
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- 3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
- 4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

- 1) Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota DKI sehingga untuk peluang wirasusaha baru cukup memadai.
- 2) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
- 3.) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya angka pengangguran
- 2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah
- 4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)
- 6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
- 7) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota

Bekasi meliputi:

1. Faktor Internal

a. Peluang

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif;

b. Tantangan

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
- 3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Faktor Eksternal

- 1). Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif

2.9. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023 Kota Bekasi **“Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2025 yaitu **Kobe Berkarya** sebagai berikut :

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
(melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi)
2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (melaksanakan Jofair)

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Proses review rancangan awal RKPD Perubahhan Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarnya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	11.088.669.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.260/Orang/bulan	17.000.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	5.000.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	75.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang dilatih	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang dilatih	10	78.000.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	75.000.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	100.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		450.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34 laporan	2.500.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	16 unit	350.000.000			umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	350.000.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	250.000.000		3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	150.000.000		2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	511,00 Orang	1,174,000,000.00		511,00 Orang	1,174,000,000.00	511,00 Orang	1,174,000,000.00	
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	3 LPK	30.000.000		3 LPK	60.000.000	20 LPK	60.000.000	
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	60 Perusahaan	100.000.000		60 Perusahaan	100.000.000	60 Perusahaan	60.000.000	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen	100.000.000		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	90 org	150.000.000		90 org	102.000.000	90 org	102.000.000	
		Job Fair/Bursa Kerja	300 org	150.000.000		90 org	150.000.000	90 org	150.000.000	
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	90 org	75.000.000		90 org	75.000.000	90 org	75.000.000	
Program Hubungan Industrial		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	1,00 Perkara	322.000.000		1,00 Perkara	322.000.000	1,00 Perkara	322.000.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	106,00 Perkara	100.000.000		106,00 Perkara	100.000.000	106,00 Perkara	100.000.000	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Lembaga	1000.000.000		1,00 Lembaga	100.000.000	1,00 Lembaga	200.000.000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 org	200.000.000		50 org	200.000.000	50 org	200.000.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi . Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (**top-down**) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (**top-down**) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang tenaga kerja mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah tahun 2025-2029 . yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Kemandirian ekonomi daerah

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan tahun 2026

Program		Indikator		Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
1		2		3	4	5	6
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase cakupan ketersediaan dokumen	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		
		2.	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengukuran Kompetensi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

							dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Program Penempatan Tenaga kerja	1.	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>		<i>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>
				<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Job Fair/ Bursa Kerja</i>	<i>Job Fair/ Bursa Kerja</i>
				<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran</i>	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran</i>		
		2.	Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin	Kewenangan Pusat			
4.	Program Hubungan Industrial		Persentase sengketa pengusaha dengan pekerja yang diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga kerja. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (**top-down**) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dirumuskan tujuan dan sasaran serta indicator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	2025
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				Rp./Orang	Rp 65.271.249,89	Rp 65.195.197,34
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Persen (%)	65,58%	65,79%
				Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%
				Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	88,52%	90%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85	0,85
				Indikator 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	100%	100%
				Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	0	0%
				Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen (%)	N/A	13,28%
				Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen (%)	84,40%	85%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Indikator: Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen (%)	43,33%	44,44%
				Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen (%)	9,93%	9,93%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
DAFTAR KEGIATAN DINAS TENAGA PERUBAHAN KERJA KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS TENAGA KERJA								18.652.520.840,00	19.350.973.840,00	18.113.302.758,00	-539.218.082,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.652.520.840,00	19.350.973.840,00	18.113.302.758,00	-539.218.082,00							0,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							18.652.520.840,00	19.350.973.840,00	18.113.302.758,00	-539.218.082,00							0,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	16.142.481.840,00	16.840.934.840,00	15.534.119.758,00	-16.142.481.840,00							0,00		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	204.207.000,00	204.207.000,00	11.349.200,00	-192.857.800,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	179.207.000,00	179.207.000,00	0,00	-179.207.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.349.200,00	-13.650.800,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	12.426.592.800,00	11.520.333.000,00	11.918.353.000,00	-508.239.800,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	2016 Orang/bulan	12.421.592.800,00	11.515.333.000,00	11.913.353.000,00	-508.239.800,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	401.250.000,00	401.250.000,00	101.300.000,00	-299.950.000,00			-	-	Aparatur Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	101.250.000,00	101.250.000,00	50.300.000,00	-50.950.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	2.07.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ANGGARAN PERUBAHAN 2025

Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD MURNI	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	P.APBD	BERTAMBAH/BERKURANG
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.207.000	179.207.000	179.207.000	155.741.000	-	(155.741.000)
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.200.000	11.349.200	(11.850.800)
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.515.333.000	11.515.333.000	11.515.333.000	11.515.333.000	11.913.353.000	398.020.000
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.250.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000	50.300.000	(50.950.000)
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	51.476.040	51.000.000	(476.040)
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	16.820.000	-	(16.820.000)
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	400.000.000	400.000.000	390.300.000	390.300.000	-
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	12.030.000	12.030.000	-
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	80.000.000
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000.000	200.000.000	200.000.000	131.524.000	131.524.000	-
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000	700.000.000	700.000.000	305.175.000	305.175.000	-
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.110.144.840	2.110.144.840	2.110.144.840	2.110.144.840	1.342.508.558	(767.636.282)
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	136.580.000	136.580.000	-
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.174.000.000	1.174.000.000	1.174.000.000	4.170.250.000	1.170.250.000	(3.000.000.000)
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.586.000	-	(29.586.000)

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100.000.000	100.000.000	100.000.000	59.565.000	-	(59.565.000)
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000	100.000.000	100.000.000	90.500.000	90.500.000	-
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	109.020.000	109.020.000	109.020.000	95.442.900	80.630.900	(14.812.000)
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	75.000.000	75.000.000	75.000.000	41.945.100	27.095.100	(14.850.000)
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	322.019.000	322.019.000	322.019.000	304.049.000	334.757.000	30.708.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	250.000.000	146.998.000	-	(146.998.000)
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	161.450.000	137.950.000	(23.500.000)
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	-	588.000.000	588.000.000
		19.350.973.840	19.350.973.840	19.350.973.840	21.309.359.880	18.113.302.758	(3.196.057.122)

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja

dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RKPD) daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target, program kegiatan.

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
2. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
3. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
4. Menjaga konsistensi antara RPJMD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025.

Plt.KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si
NIP. 19670114198610 2001